

# **RENCANA KERJA**

## **BNN KABUPATEN BIMA**

### **TAHUN 2025**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**KABUPATEN BIMA**  
**TAHUN 2025**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Kondisi Umum Permasalahan Narkoba.....	1
B. Kondisi Capaian dan Evaluasi Penanganan Permasalahan Narkoba .....	4
C. Potensi dan Tantangan Penanganan Permasalahan Narkoba.....	10
<b>BAB II    KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL</b> .....	<b>12</b>
A. Tujuan Organisasi .....	12
B. Arah Kebijakan dan Strategi Operasional.....	13
<b>BAB III    RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN</b> .....	<b>14</b>
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	<b>16</b>
<b>Lampiran    1 Matriks Rencana Kerja BNN Kabupaten Bima 2025</b> .....	<b>17</b>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Rencana Kerja BNN Kabupaten Bima Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Rencana Kerja BNN Kabupaten Bima Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta rencana sumber pembiayaannya. Rencana Kerja BNN Kabupaten Bima merupakan hasil sinkronisasi dengan Rencana strategis BNN tahun 2025 - 2029 yang memiliki nilai strategis dalam memperkuat kapasitas dan infrastruktur BNN untuk menghadapi dinamika ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Rencana Kerja ini adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Bima sebagai unsur penunjang BNN Provinsi NTB dalam penyelenggaraan upaya P4GN di Kabupaten/Kota Bima dan Kabupaten Dompu.

Dokumen Rencana Kerja ini menjadi landasan terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sehingga akan terjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organisasi. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna.

Demikian Rencana Kerja BNN Kabupaten Bima Tahun 2025 ini disusun. Kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Rencana Kinerja Tahunan ini sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

**Bima, 30 Januari 2025**

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten Bima**



*Fery Priyanto*  
**Fery Priyanto, S.Sos., M.M.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. KONDISI UMUM PERMASALAHAN NARKOBA**

Narkoba merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional termasuk didalamnya ketahanan daerah. Hal ini dikarenakan daya rusak narkoba yang sangat kompleks dimana berdampak buruk terhadap kesehatan pengguna, kehidupan sosial kemasyarakatan, meningkatkan tindak kriminalitas, menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan berujung pada penurunan kualitas dan daya saing bangsa.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang meningkat di tahun 2021, dimana pada tahun 2019 berhasil ditekan. Indonesia saat ini juga menjadi pasar terbesar penjualan dan peredaran narkoba di Asia. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis berupa negara kepulauan dimana jalur laut sering dimanfaatkan untuk penyelundupan narkoba, jumlah penduduk yang banyak, harga narkoba yang mahal di Indonesia dibandingkan negara lain, dan tingkat permintaan yang terus meningkat.

Provinsi NTB merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki kondisi geografis yang strategis untuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Apalagi didukung dengan sektor pariwisata yang terus berkembang dan penduduk yang didominasi oleh usia kerja. Faktor tersebut mendorong peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus meningkat seiring peningkatan kasus narkoba secara nasional.

Penanganan narkoba di Indonesia khususnya di Wilayah Kerja BNN Kabupaten Bima (Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu) perlu terus ditingkatkan mengingat dampak buruk narkoba bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jumlah kasus narkoba harus terus ditekan. Perang Terhadap Narkoba harus terus dilakukan demi mewujudkan NTB yang bebas dari narkoba dan “Gemilang” (Visi Gubernur NTB) serta meningkatkan ketahanan daerah Provinsi NTB. Kajian ini akan membahas tentang bagaimana upaya meningkatkan kualitas P4GN di Provinsi NTB khususnya di wilayah kerja BNN Kabupaten Bima sebagai bentuk perang melawan narkoba.

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Kabupaten Bima, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat Khususnya di wilayah kerja BNN Kabupaten Bima yang meliputi Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

**a. Problematika pengawasan peredaran.**

Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut:

- 1) Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga pemasyarakatan.
- 2) Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tidak resmi.
- 3) Banyaknya jalur lintas batas tidak resmi sebagai pintu keluar masuk antar pulau.

**b. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah.**

Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain:

- 1) Pelaksanaan program Desa Bersinar dan Kota Tanggap Ancaman Narkoba belum dilaksanakan secara terintegrasi termasuk pelaksanaan IBM pada satu lokasi yang sama, serta belum memanfaatkan digitalisasi dalam pelaksanaannya.
- 2) Kurangnya dukungan regulasi, sistem informasi, blueprint pelaksanaan program Desa Bersinar dan Kota Tanggap Ancaman Narkoba, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan termasuk swasta.
- 3) Perlunya sistem teknologi informasi guna mendukung dan mempermudah pelayanan P4GN kepada publik baik dalam penyuluhan, rehabilitasi, pembuatan SKHPN, dan dalam pelaksanaan TAT.
- 4) Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.
- 5) Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

**c. Belum optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan.**

Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- 1) Masih banyak pecandu narkoba yang relaps setelah menjalani program rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba. Bahkan terjadi peralihan penggunaan jenis narkoba dari satu jenis ke jenis narkoba lainnya oleh kalangan pecandu narkoba.
- 2) Sebaran dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang terbatas, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan assessment penyalah guna narkoba di wilayah yang tidak tersedia lembaga rehabilitasi.
- 3) Kesepahaman kalangan aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna dan atau pecandu narkoba yang masih rendah sehingga upaya penyelamatan penyalah guna dan atau pecandu narkoba melalui rehabilitasi belum maksimal.
- 4) Perlunya monitoring dan evaluasi pelaksanaan IBM yang efektif secara digitalisasi.
- 5) Diperlukan integrasi data untuk mendukung kebutuhan internal maupun eksternal berupa database lidik sidik, database TAT, database klien rehab, data klien pascarehab, data prevalensi, data relawan, data penggiat, data IBM, serta data edukasi publik tentang narkoba.

## **B. KONDISI CAPAIAN DAN EVALUASI PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOBA**

Permasalahan narkoba di Bima harus ditangani secara serius, mengingat kondisi geografis dan demografis Kabupaten Bima maupun Kota Bima dan Kabupaten Dompu yang mendukung serta peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat. Sasaran pembangunan nasional dalam penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi dengan indikator penurunan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba.

BNN Kabupaten Bima menindaklanjuti sasaran pembangunan tersebut melalui beberapa upaya sebagai berikut:

### **a. Pencegahan**

Kegiatan pencegahan dilakukan dengan tujuan untuk menekan sisi membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dari pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kegiatan ini dilakukan melalui:

- Mengembangkan sistem pertahanan diri (imunitas) masyarakat secara intensif melalui upaya promotif dan pengembangan kecakapan hidup sejak usia dini.
- Mengembangkan sistem deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, pendidikan, kerja, dan masyarakat.
- Mengoptimalisasi peran serta instansi pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan (agama, wanita, pemuda, profesi, dll) dalam kampanye masif anti narkoba.
- Mengembangkan pemberdayaan alternatif di daerah rawan peredaran gelap narkoba

### **b. Pemberantasan**

Meskipun tidak adanya seksi pemberantasan di BNN Kabupaten Bima, tetapi upaya pemberantasan juga dilakukan seperti meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas instansi dan dalam rangka pengungkapan sindikat tindak kejahatan narkoba untuk dilaporkan ke BNNP NTB.

Upaya – upaya tersebut dilakukan dalam rangka menyeimbangkan penekanan baik sisi *demand* ataupun *supply*. Pada tataran implementasi, kegiatan pencegahan dan pemberantasan tersebut dapat dioptimalkan melalui beberapa strategi berikut:

- **Mendorong Pemerintah Daerah / Pemerintah Kota untuk menyusun Perda P4GN di daerah.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika mengamanatkan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten / Kota untuk menyusun penyusunan peraturan daerah mengenai P4GN. Pada tahun 2020 tepatnya 23 Desember 2020, Pemerintah Provinsi NTB telah mengundang Pergub No 78 Tahun 2020 tentang fasilitasi P4GN. BNN Kabupaten Bima bersama dengan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota perlu mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Perda P4GN agar P4GN di daerah dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Dengan adanya Perda P4GN di daerah diharapkan dapat mendorong:

- 1) Penyusunan Rencana Aksi P4GN di daerah
- 2) Pembentukan tim terpadu P4GN di kabupaten/kota dan kecamatan.

- **Penguatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah memiliki tupoksi penyelenggaraan P4GN di daerah yang berfokus pada upaya pencegahan. Tupoksi ini dijalankan oleh Kantor/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk itu BNN Kabupaten Bima perlu meningkatkan kerjasama dengan Kantor/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah untuk bersama-sama menekan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten/Kota Bima maupun Kabupaten Dompu.

- **Meningkatkan alternatif pendanaan dari swasta dan masyarakat**

Kampanye anti narkoba bisa disinergikan dengan berbagai kegiatan swasta, baik melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan maupun kampanye perusahaan tersebut untuk meningkatkan *brand awareness* perusahaan, seperti yang sudah mulai banyak dilakukan oleh sejumlah perusahaan.

Berbagai model alternatif pendanaan kampanye anti narkoba dengan menggunakan pendanaan dari swasta dan masyarakat masih perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan baik dengan berbagai komponen swasta yang lain, maupun dengan berbagai variasi model kampanyenya mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah.

- **Mendorong pembentukan rumah edukasi anti narkoba di Kabupaten/Kota**

Sebagai bagian dari kampanye gerakan anti narkoba, BNN akan mendorong pembangunan rumah edukasi anti narkoba di Kabupaten/Kota dengan menggandeng Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Rumah edukasi gerakan anti Narkoba dapat dipergunakan masyarakat dalam memperoleh informasi yang lengkap mengenai bahaya Narkoba baik tubuh, keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, masyarakat dapat menyelenggarakan aktivitas-aktivitas positif yang inspiratif, pengembangan potensi dan kemampuan, dan menjadi pusat pendidikan karakter.

- **Mendorong pembentukan desa bersinar**

BNN bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendorong terwujudnya desa bersinar tersebut dan diprioritaskan pada daerah rawan dan rentan narkoba di Kabupaten/Kota. Selanjutnya BNN Kabupaten Bima dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat mendorong desa/kelurahan di Kabupaten/Kota Bima dan Kabupaten Dompu untuk mengalokasikan anggaran P4GN dalam APBDDes - nya serta meningkatkan pendampingan pembentukan desa bersinar.

- **Inovasi dalam kampanye / sosialisasi anti narkoba**

Kampanye / sosialisasi anti narkoba perlu terus dilakukan inovasi seperti dengan penggunaan media sosial, vlog, lomba poster anti narkoba, cerdas cermat anti narkoba, cipta lagu anti narkoba lomba pembuatan film pendek atau vlog. Inovasi dapat diarahkan kepada pendekatan TIK mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat.

- **Penguatan peran serta masyarakat**

Salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah narkoba adalah masih rendahnya peran serta masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat adalah melalui pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk:

- 1) Pembinaan teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba.
- 2) Bimbingan teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba.
- 3) Pengidentifikasian dan pengembangan potensi sumber daya stakeholder dan masyarakat dalam rangka mendukung P4GN.
- 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas penggiat dan relawan anti narkoba.
- 5) Fasilitasi dan dukungan pembinaan masyarakat anti Narkoba.

Siklus selanjutnya dalam penanganan permasalahan narkoba adalah rehabilitasi penyalahguna dan atau korban penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

BNN Kabupaten Bima berupaya melakukan penguatan kepada lembaga rehabilitasi baik pemerintah maupun komponen masyarakat dengan berbagai pendekatan. Diantaranya upaya pemetaan, monitoring dan evaluasi perkembangan lembaga rehabilitasi. Bimbingan teknis dan pelatihan tenaga rehabilitasi juga terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan lembaga rehabilitasi kepada masyarakat.

Meskipun secara kuantitatif upaya penguatan lembaga rehabilitasi telah meningkat namun dari sudut pandang kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa upaya penguatan lembaga rehabilitasi masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.

Capaian kinerja BNN Kabupaten Bima secara keseluruhan pada tahun 2024 atas arah kebijakan dan strategi dalam Renstra BNN RI Tahun 2020 - 2024 menunjukkan hasil yang baik. Begitu pula aspirasi masyarakat yang ditunjukkan dalam hasil survei atas pelayanan BNN Kabupaten Bima kepada stakeholders menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, walaupun ada beberapa hal yang diharapkan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

Capaian kinerja BNN Kabupaten Bima merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh seluruh pejabat pemangku program dengan Kepala BNN Kabupaten Bima untuk mencapai sasaran strategis, secara cascading.

Sasaran strategis yang dicapai merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik, apakah program dan kegiatan yang dilakukan memiliki benefit (manfaat) kepada masyarakat.

Dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Bima Tahun 2024 ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) indikator. Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan semua mencapai target dengan rincian 3 (tiga) indikator sesuai target dan 7 (tujuh) indikator melampaui target.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian kinerja BNN Kabupaten Bima Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	52,00 Indeks	54,01 Indeks	104%
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan Narkoba	86,607 Indeks	94,821 Indeks	109%
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,31 Indeks	3,77 Indeks	114%
4.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	82,81%	122%
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100%

6.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	2 Unit	100%
7.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Bima	3,42 Indeks	3,61 Indeks	106%
8.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Bima	86 Indeks	99.67 Indeks	116%
9.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Bima	98,33 Indeks	99.85 Indeks	102%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kabupaten Bima selama kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.

Beberapa hal yang belum secara optimal diselesaikan dan menjadi atensi BNNK Bima tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi aspirasi masyarakat mengenai keinginan melakukan tes urine kepada seluruh ASN di Pemerintah Kabupaten Bima, Pemerintah Kota Bima dan Pemerintah Kabupaten Dompu.
2. Merespon laporan masyarakat mengenai adanya laporan aktivitas transaksi jual beli narkoba di beberapa wilayah baik itu di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

## **C. POTENSI DAN TANTANGAN PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOBA**

### 1. Potensi

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan narkoba di wilayah Kabupaten/Kota Bima dan Kabupaten Dompu, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Kabupaten Bima yang dapat dikelola dan dioptimalisasi. Berbagai potensi tersebut adalah :

- a. Meningkatnya komitmen dan keberpihakan bersama dalam menempatkan dan memperlakukan kejahatan narkoba sebagai isu kejahatan nasional dan internasional;
- b. Adanya perjanjian kerja sama antar instansi pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat di daerah;
- c. Perspektif penanganan masalah dalam kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya integrasi dan kolaborasi melalui pelibatan banyak instansi penegak hukum.

### 2. Tantangan

Terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Kabupaten Bima, dimana permasalahan - permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten/Kota Bima dan Kabupaten Dompu adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

- a. Problematika pengawasan peredaran.

Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut:

- 1) Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga pemasyarakatan.
- 2) Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tidak resmi.
- 3) Banyaknya jalur lintas batas tidak resmi sebagai pintu keluar masuk antar pulau.

- b. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah. Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain:
- 1) Lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
  - 2) Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.
  - 3) Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat lokal untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.
  - 4) Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut.
  - 5) Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Belum optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan.
- Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal:
- 1) Masih banyak pecandu narkoba yang relaps setelah menjalani program rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba. Bahkan terjadi peralihan penggunaan jenis narkoba dari satu jenis ke jenis narkoba lainnya oleh kalangan pecandu narkoba.
  - 2) Sebaran dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang terbatas, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan assessment penyalah guna narkoba di wilayah yang tidak tersedia lembaga rehabilitasi.
  - 3) Kesepahaman kalangan aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalahguna dan atau pecandu narkoba yang masih rendah sehingga upaya penyelamatan penyalah guna dan atau pecandu narkoba melalui rehabilitasi belum maksimal.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL**

#### **A. TUJUAN ORGANISASI**

Tujuan Organisasi BNN Kabupaten Bima sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN Kabupaten Bima 2025 - 2029 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. **Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat Kabupaten/Kota Bima dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.**

Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan.

Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

2. **Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.**

Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi. Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Kabupaten Bima sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

## **B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL**

Kebijakan dan strategi operasional BNN Kabupaten Bima merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2025-2029 adalah:

1. Penguatan kolaborasi;
2. Penguatan intelijen;
3. Penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara;
4. Penguatan kerjasama dengan negara perbatasan;
5. Pendekatan iconic dan tematik;
6. Penguatan sumber daya dan infrastruktur.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Kabupaten Bima juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Permasalahan narkoba di Kabupaten/Kota Bima dan Kabupaten Dompu harus ditangani secara serius, mengingat kondisi geografis dan demografis wilayah tersebut yang mendukung serta peningkatan peredaran dan penyalahgunaan yang terus meningkat. Sasaran pembangunan nasional dalam penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan dan rehabilitasi dengan indikator penurunan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba.

### BAB III

## RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima menetapkan rencana kinerja dan pendanaan tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN RI tahun 2025. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah Kabupaten/Kota.

Rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan skala prioritas permasalahan narkoba di wilayah dan kondisi dukungan dan kapasitas sumber daya pada BNN Kabupaten Bima. Rumusan rencana kinerja dan pendanaan BNN Kabupaten Bima telah memperhatikan struktur kebijakan, struktur organisasi, struktur anggaran, dan struktur kinerja secara berjenjang hingga tingkat jabatan terendah. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kabupaten Bima tahun 2025 sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	94,821 Indeks	Rp. 75.000.000
2.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,780 Indeks	Rp. 113.705.000
3.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	54,01 Indeks	Rp. 57.000.000
4.	Pascarehabilitasi Penyalahgunaan/atau Pecandu Narkotika	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahgunaan/atau Pecandu Narkotika	Persentase Penyalahgunaan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	82,81%	Rp. 11.560.000
		Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada	3,61 Indeks	

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
			Fasilitas Rehabilitasi BNN		
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang Terlatih	5 Orang	Rp. 13.827.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga	Rp. 74.770.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	1 Unit	
7.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	99,95 Indeks	Rp. 70.262.000
8.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang Efektif dan Efisien			Rp. 10.340.000
9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	"Sangat Baik"	Rp. 44.988.000
10.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Pelayanan Umum yang Maksimal			Rp. 1.015.604.000
11	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien			Rp. 5.000.000

\*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima tahun 2025 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Kabupaten Bima tahun 2025 - 2029. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Kabupaten/Kota selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

**MATRIKS RENCANA KERJA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIMA  
TAHUN 2025**

Nama Organisasi / Unit Kerja : BNN Kabupaten Bima  
Tahun : 2025

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	94,821 Indeks	Rp. 75.000.000
2.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,780 Indeks	Rp. 113.705.000
3.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	54,01 Indeks	Rp. 57.000.000
4.	Pascarehabilitasi Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkotika	Persentase Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	82,81%	Rp. 11.560.000
		Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,61 Indeks	
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang Terlatih	5 Orang	Rp. 13.827.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga	Rp. 74.770.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
	Komponen Masyarakat	layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	1 Unit	
7.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	99,95 Indeks	Rp. 70.262.000
8.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang Efektif dan Efisien			Rp. 10.340.000
9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	"Sangat Baik"	Rp. 44.988.000
10.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Pelayanan Umum yang Maksimal			Rp. 1.015.604.000
11	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien			Rp. 5.000.000

Bima, 30 Januari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Bima



Fery Priyanto, S.Sos., M.M.